

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output agregat (nilai dari semua barang dan jasa yang diperoleh atas rutinitas perekonomian) atau Produk Domestik Bruto (PDB). PDB yakni jumlah atas semua total pengeluaran akhir yang diperoleh atas kegiatan ekonomi, adapun yang dijalankan penduduk lokal atau warga asing bertempat tinggal di negara itu sendiri. Maka dari itu, takaran umum yang seringkali dipakai untuk mengukur laju perkembangan ekonomi yaitu dengan cara menghitung perubahan persentase PDB untuk ukuran nasional serta perubahan persentase PDRB ukuran Provinsi atau Kab/Kota.

Mankiw (2007) Model pertumbuhan Solow di ciptakan agar menunjukkan bagaimana perkembangan atas ketersediaan modal, perkembangan angkatan kerja, capaian peningkatan teknologi perekonomian, juga seperti apa dampaknya ke pengeluaran jasa dan barang di dalam satu wilayah dengan menyeluruh. Model dari Solow (Mankiw, 2007) pengeluaran serta jumlah barang yang diperoleh atas sebuah rutinitas ekonomi, bergantung kepada tenaga kerja juga ketersediaan modal melalui suatu guna produksi yang mempunyai ukuran hasil yang tetap.

Pertumbuhan ekonomi yaitu satu di antara pengukuran untuk mengetahui bagaimana perkembangan capaian dalam perekonomian, baik itu ditingkat nasional maupun dalam tingkatan regional (daerah). Dimana komponen pajak daerah menjadi potensi primer dalam meningkatkan kemajuan suatu wilayah. Pajak Daerah yaitu pajak yang sudah ditentukan daerah dengan tujuan Pendanaan Rumah Tangga Pemerintah Daerah. Perolehan sumber potensial perekonomian daerah berasal dari sejumlah pajak tetapi masalah yang biasanya terjadi dari komponen pajak yaitu tidak berjalannya semua pembayaran pajak dengan efisien dan cenderung tersendat. Pemasukan potensial daerah adalah dari pajak, hal itu terbukti karena pajak memiliki beberapa penerimaan yang potensial terhadap daerah yang bersumber atas Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Tontonan, Pajak Reklame dan lain lain.

Kemudian wilayah yang dibekali dengan beragam kemampuan pembangunan perekonomian, sebagaimana daerah mempunyai potensi seperti perikanan, kelautan, industri dan pertanian menjadi satu dari banyak potensi harus digali menggunakan penanganan secara tepat oleh pemerintah agar hal demikian bisa menjalankan penambahan perekonomian berujung pada kemakmuran masyarakatnya. Sama halnya bagi daerah yang memperoleh bermacam potensi atas pembangunan ekonominya lewat sektor lain. Berbagai potensial wilayah tersebut hendaknya dapat bisa dijaga dan dikelola secara tepat guna menjaga keselarasannya bersama lingkungan itu sendiri.

Pertumbuhan Ekonomi menjadi satu pengukuran primer agar melihat bagaimana capaian suatu Pembangunan Ekonomi yang sedang berlangsung dalam suatu Negara. *Growth* (Pertumbuhan) tidaklah sama dengan pertumbuhan pembangunan (*development*). *Economic Growth* menjadi salah satu dari sekian macam syarat yang dibutuhkan untuk proses rutinitas pembangunan. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi hanya mencatatkan hasil produksi barang dan jasa taraf nasional, adapun pembangunan adalah dalam cakupan dalam arti lebih besar.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dapat diartikan dengan jumlah dari nilai tambah total yang didapat dari segala unit usaha atas satu daerah, atau juga bisa diartikan suatu penjumlahan dari semua nilai barang dan jasa akhir yang telah dihasilkan oleh keseluruhan unit perekonomian di dalam suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku memperlihatkan nilai tambah dari barang dan jasa terhitung dengan harga konstan yang dapat memperlihatkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung memakai harga atas tahun tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan dipergunakan agar melihat bagaimana capaian Pertumbuhan Ekonomi dari tahun ke tahun, sedangkan artian Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku versi BPS dipakai untuk mengukur besar kecilnya susunan dalam perekonomian. Manfaat dari menganalisis gejala nilai PDRB ialah untuk melihat, mendapatkan dan mengetahui struktur susunan perekonomian dalam suatu daerah. Menganalisis nilai PDRB yang dilakukan tersebut akan diperoleh apakah Daerah tersebut termasuk kawasan jasa, industri, atau pertanian dan berapa banyak partisipasi dari

setiap masing sektor tersebut dan juga dapat menjadi nilai pembandingan perekonomian dari waktu ke waktu, sebab dari itu penghitungan dilakukan dari setiap tahun ke tahun. Diharapkan bisa mendapatkan gambaran dari setiap penambahan serta penurunan kesejahteraan dan kemajuan di suatu wilayah tersebut.



Tabel 1.1
Laju dan Perkembangan PDRB ADHK 19 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2017-2021 (Juta Rupiah)

Kab/Kota	Tahun	PDRB ADHK	Laju PDRB (%)
Kepulauan Mentawai	2017	2.741.550,40	5.12
	2018	2.875.664,08	4.89
	2019	3.011.724,32	4.73
	2020	2.956.007,49	-1.85
	2021	3.041.049,23	2.88
Pesisir Selatan	2017	8.678.053,24	5.41
	2018	9.139.972,32	5.32
	2019	9.576.664,10	4.78
	2020	9.470.782,68	-1.11
	2021	9.790.359,53	3.37
Kabupaten Solok	2017	8.964.874,30	5.32
	2018	9.430.224,93	5.19
	2019	9.905.603,30	5.04
	2020	9.794.967,67	-1.12
	2021	10.119.821,81	3.32
Sijunjung	2017	6.135.755,76	5.26
	2018	6.446.992,48	5.07
	2019	6.757.041,41	4.81
	2020	6.683.021,42	-1.10
	2021	6.893.213,71	3.15
Tanah Datar	2017	8.782.098,09	5.11
	2018	9.224.518,53	5.04
	2019	9.684.473,44	4.99
	2020	9.575.502,20	-1.13
	2021	9.891.019,79	3.30
Padang Pariaman	2017	12.350.186,95	5.58
	2018	13.021.887,79	5.44
	2019	13.334.924,69	2.40
	2020	11.939.479,19	-10.46
	2021	12.199.848,45	2.18
Agam	2017	13.249.246,53	5.43
	2018	13.942.516,42	5.23
	2019	14.608.893,72	4.78
	2020	14.407.114,06	-1.38
	2021	14.939.508,57	3.70
Lima Puluh Kota	2017	10.123.647,61	5.33
	2018	10.653.261,47	5.23
	2019	11.192.422,88	5.06
	2020	11.062.316,76	-1.16
	2021	11.430.547,76	3.33
Pasaman	2017	5.614.284,67	5.08
	2018	5.893.340,23	4.97
	2019	6.176.325,76	4.80
	2020	6.122.756,21	-0.87
	2021	6.330.067,38	3.39
Solok Selatan	2017	3.612.641,03	5.15
	2018	3.793.185,19	5.00
	2019	3.977.408,80	4.86
	2020	3.928.031,72	-1.24
	2021	4.059.514,72	3.35

Kab/Kota	Tahun	PDRB ADHK	Laju PDRB (%)
Dharmasraya	2017	6.843.182,09	5.44
	2018	7.204.465,92	5.28
	2019	7.560.323,31	4.94
	2020	7.454.967,68	-1.39
	2021	7.709.700,35	3.42
Pasaman Barat	2017	10.384.391,53	5.34
	2018	10.925.625,62	5.21
	2019	11.411.830,76	4.45
	2020	11.259.451,50	-1.34
	2021	11.682.233,99	3.75
Padang	2017	39.675.728,60	6.23
	2018	42.081.536,73	6.06
	2019	44.456.786,18	5.64
	2020	43.631.942,85	-1.86
	2021	45.227.956,56	3.66
Kota Solok	2017	2.580.783,66	5.76
	2018	2.726.707,11	5.65
	2019	2.876.461,35	5.49
	2020	2.835.750,32	-1.42
	2021	2.936.827,72	3.56
Sawah Lunto	2017	2.517.150,16	5.74
	2018	2.655.619,77	5.50
	2019	2.796.536,45	5.31
	2020	2.760.924,18	-1.27
	2021	2.829.590,03	2.49
Padang Panjang	2017	2.312.713,05	5.80
	2018	2.444.773,80	5.71
	2019	2.580.604,24	5.56
	2020	2.543.403,93	-1.44
	2021	2.631.518,09	3.46
Bukittinggi	2017	5.483.398,44	6.08
	2018	5.812.391,14	6.00
	2019	6.152.076,98	5.84
	2020	6.045.085,08	-1.74
	2021	6.263.129,76	3.61
Payakumbuh	2017	3.997.854,36	6.12
	2018	4.238.662,76	6.02
	2019	4.488.210,66	5.89
	2020	4.413.983,73	-1.65
	2021	4.571.926,96	3.58
Pariaman	2017	3.234.234,59	5.61
	2018	3.411.294,75	5.47
	2019	3.592.021,58	5.30
	2020	3.544.659,85	-1.32
	2021	3.669.629,10	3.53

Sumber : BPS Sumatera Barat

Dilihat dari PDRB ADHK 19 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 5 tahun belakang 2017-2021 yang berfluktuatif setiap tahunnya, hanya saja sangat disayangkan rata-rata terjadi penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020 akibat pandemic covid 19 dimana penurunan laju PDRB dari tahun 2019-2020 sebesar 7,08 % , hal tersebut berdampak pada minusnya laju pertumbuhan PDRB ADHK pada tahun 2020.

Berdasarkan data pada table 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan dapat kita lihat bahwa pada 19 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat Kota Padang memiliki jumlah PDRB ADHK tertinggi di antara Kab/Kota lain. Data terakhir yaitu di tahun 2021 sebesar 45,22 Triliun Rupiah. Namun pada laju PDRB ADHK Kota Padang mengalami penurunan sebesar 7,5% di tahun 2020 dan kembali naik sebesar 5,52% dimana hal itu dibantu dengan mulainya penerapan digitalisasi dalam perekonomian selama pandemic covid-19.

Hal itu juga terlihat di kota pariaman, dimana penurunan laju PDRB drastic yang terjadi pada tahun 2019-2020 sebesar 12% dan hal tersebut bisa di tanggulangi kembali di tahun 2021 dengan kenaikan sebesar 12%. Dapat disimpulkan bahwa walaupun pada tahun 2020 penurunan laju PDRB terjadi secara merata di setiap daerah, namun hal tersebut bisa diredakan dalam kurun waktu 1 tahun yakni di tahun 2021 sebesar 5,53 %.

Untuk meningkatkan jumlah pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Sumatera Barat maka pemerintah selalu berupaya mengenal mendalam komponen pertumbuhan ekonomi daerah salah satunya kontribusi dari pajak dan retribusi daerah (Sunarto dan Sunyoto, 2016).

Nilai dari Pajak dan Retribusi Daerah nan tinggi menandakan jika pemasukan kepada kas daerah juga semakin bagus/banyak, diperlukan berbagai upaya dari pemerintah agar meningkatkan perekonomian daerahnya terus membaik dan berkelanjutan. Daerah yang mampu mencukupi keperluan daerahnya sendiri tanpa campur tangan bantuan pihak dari luar, (dimaksudkan disini adalah uluran tangan dari pemerintah pusat), berarti dapat diucapkan daerah tersebut mempunyai derajat kemandirian daerah yang tinggi. Uluran tangan atau

bantuan dari pusat yang kecil menjadi ukuran kemandirian daerah tersebut. Kebalikannya, kemandirian daerah yang kecil, terdapat uluran tangan dari pemerintah pusat yang besar (dalam artian tak mampu untuk mengatasi masalahnya sendiri tanpa bantuan dari atas). Dikatakan mandiri berarti laju pertumbuhan ekonominya bagus atau sejahtera, hal tersebut juga selaras dengan pertumbuhan ekonomi di dalam daerahnya juga mengalami pertumbuhan/peningkatan.

Bersumber dari latar belakang diatas yang telah digambarkan, dapat diturunkan rumusan masalah untuk penelitian ini yaitunya Apakah pajak dan retribusi daerah memberikan pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengetahui lebih lanjut dalam penelitian ini penulis tergerak untuk menjadikan sebuah karya ilmiah, dengan judul **“Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, dapat dikatakan titik awal dalam melaksanakan pembangunan ekonomi berawal dari khususnya daerah kabupaten/kota, maka dari itu diharapkan untuk daerah tersebut agar lebih bisa mengetahui apa yang menjadi kelebihan, potensi dan kebutuhan untuk daerahnya, agar daerah tersebut berdiri dengan komplit.

Dapat dikatakan pembangunan Ekonomi Daerah yaitu suatu rangkaian dari seluruh bagian masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengendalikan beragam sumber daya yang dimiliki dan membuat sebuah sistem kerjasama agar terciptanya sebuah tempat kerja baru, serta dapat meningkatkan semua proses perekonomian dalam daerah tersebut. Dengan berpatokan sebagai alasan landasan yuridis untuk peningkatan otonomi daerah di Indonesia yang disusun pada Undang-undang no 23 tahun 2014. Kedaulatan dan desentralisasi daerah memberikan suatu kuasa penuh kepada daerah atas mengelola urusan di dalam daerahnya itu sendiri. Dimana hal tersebut mengharuskan pemerintah daerahnya agar lebih disiplin dan tepat dalam hal mengumpulkan pajak dan retribusi daerahnya. Di sini juga diharapkan agar pemerintah daerah bisa dengan tepat

dalam mengalokasikan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang sudah dikumpulkan agar tercapai di sini masyarakat yang sejahtera, merata, makmur dan adil tentunya sebagaimana tersirat dalam undang-undang dasar dan Pancasila RI tahun 1945.

Dengan adanya poin kemampuan pajak dan retribusi daerah di Sumatera Barat diharapkan dapat dioptimalkan agar bisa mendorong kenaikan atas pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Barat, terutama agar menjadi penunjang atas aktifitas ekonomi Sumatera Barat lewat pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menopang semua perkara perekonomian masyarakat. Dengan terjalankannya pembangunan tersebut maka hal tersebut diharapkan dapat menyokong peningkatan ekonomi agar terus meningkat dan mendapatkan tujuan akhir.

Berdasarkan latar belakang persoalan diatas bisa dibuat beberapa rumusan masalah penelitian seperti berikut:

1. Bagaimana dampak pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana dampak retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana dampak pajak dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penulisan Umum

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dampak penerimaan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengkaji dampak retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengkaji dampak penerimaan pajak dan retribusi kepada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian yaitu:

1. Bagi penulis, bermanfaat dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah didapat semasa perkuliahan.
2. Bagi pemerintah, penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi sehingga pemerintah selaku regulator bisa merencanakan dan mengembangkan serta memutuskan arah kebijakan tersebut secara lebih baik lagi.
3. Bagi pihak-pihak lain yang berkeperluan, penelitian diharapkan bisa dipakai sebagai bahan pustaka, referensi dan informasi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

